

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki dampak serius terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan proses perekrutan, pengangkutan, dan penampungan korban secara ilegal, tetapi juga sering kali disertai dengan unsur penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, serta eksploitasi yang merugikan korban baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Dalam praktiknya, penanganan kasus TPPO masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan perlindungan terhadap korban, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang. Oleh karena itu, upaya penanggulangan TPPO memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan peran pemerintah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat
2. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan rasa keadilan, keamanan, serta pemulihan yang layak bagi para korban. Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur

mengenai pencegahan dan penanganan TPPO, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Korban seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses terhadap bantuan hukum, rehabilitasi, maupun reintegrasi sosial setelah mengalami eksploitasi. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memperkuat mekanisme perlindungan korban, meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku, serta memperluas program pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

## **B. Saran**

1. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan regulasi dalam proses perekrutan serta penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Pengawasan tersebut perlu dilakukan secara lebih ketat terhadap agen perekrut, perusahaan penempatan tenaga kerja, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses migrasi tenaga kerja. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kepolisian, dan Kementerian Luar Negeri perlu ditingkatkan agar penanganan kasus perdagangan orang dapat dilakukan secara lebih efektif. Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang juga harus dilakukan secara tegas dengan memberikan sanksi pidana yang berat agar menimbulkan efek jera

serta mampu memutus jaringan perdagangan orang yang bersifat terorganisir dan lintas negara.

2. Pemerintah bersama masyarakat perlu meningkatkan upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan modus tindak pidana perdagangan orang, khususnya terkait tawaran pekerjaan di luar negeri melalui jalur tidak resmi atau melalui media sosial. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi tanpa prosedur yang jelas. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran melalui penyediaan informasi yang transparan mengenai prosedur kerja di luar negeri, akses terhadap bantuan hukum, serta mekanisme pelaporan yang mudah bagi masyarakat yang menjadi korban atau mengetahui adanya praktik perdagangan orang. Dengan adanya langkah pencegahan yang komprehensif tersebut, diharapkan angka kasus perdagangan orang di Indonesia dapat ditekan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat lebih terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Alston, P, Goodman, R, 2022, *International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford.

Anabela Miranda Rodrigues, Maria João Guia (ed.), 2024, *New Forms of Human Trafficking: Global South Highlights and Local Contexts on Sexual and Labor Exploitation*, Springer, Cham.

Anne T. Gallagher, 2020, *The International Law of Human Trafficking*, Cambridge University Press, Cambridge.

Beatriz Susana Uitts, 2024, *Sex Trafficking of Children Online*, Bloomsbury Academic, London.

Boister, 2018, *An Introduction to Transnational Criminal Law*, Second Edition, Oxford University Press, Oxford.

Crawford, J, 2022, *State Responsibility: The General Part*, Cambridge University Press, Cambridge.

Debora Kartikasari, 2010, *Trafficking: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Felia Allum, Stan Gilmour, 2021, *Routledge Handbook of Transnational Organized Crime*, Routledge, Francis.

- Fiona David, 2014, *The International Law of Migrant Smuggling*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- James C. Hathaway, 2021, *The Rights of Refugees under International Law*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Lestari, Nugroho, 2022, *Human Trafficking in Southeast Asia*, Oxford University Press, Oxford.
- M. Ali Mansyur, 2021, *Hukum Pidana Human Trafficking*, Kencana, Jakarta.
- Malcolm N. Shaw, 2021 *International Law*, 9th ed., Cambridge University Press, Cambridge.
- Neil Boister, 2020, *An Introduction to Transnational Crime Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Philip Alston & Ryan Goodman, 2023 *International Human Rights*, Oxford University Press, Oxford.
- Romli Atmasasmita, 2020, *Hukum Pidana Internasional*, STIK, Bandung.
- Rosmala Dewi, 2024, *Analisis Keputusan Indonesia dalam Meratifikasi ACTIP*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat.
- S. R. Sianturi, 2023, *Hukum Pidana Khusus*, Ahaem Patehaem, Jakarta.

Sari, Prabowo, 2020, *Victim Protection in Human Trafficking Case in Indonesia*, Jakarta.

Schloenhardt, A, Calderoni, F, 2023, *UN Convention Against Transnational Organized Crime: A Commentary*, Oxford, Oxford University Press.

Sulistiyowati Iriant, 2021, *Akses Keadilan dan Migrasi Tenaga Kerja*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta.

Suratman & Daillah Philips, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta Cetakan Kedua, Bandung.

William A. Schabas, 2021, *The International Human Rights Law*, Cambridge University Press, Cambridge.

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal**

Ardi Samuel Manurung, 2025, *Tinjaun Kriminologi Terjadinya Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Terhadap Perempuan dan Anak di Pontianak*, Jurnal Fatwa Hukum, Vol. 8, No. 2.

Ayu Dewi Rachmawati, Komang Febrinayanti Dantes, 2025, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Manusia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10, No. 3.

Bridget Anderson & Rutvica Andrijasevic, 2021, *Human Trafficking and Human Rights*, *European Journal of International Law*, Vol. 31 No. 4.

Janie Chuang, 2021, *Exploitation Creep and the Unmaking of Human Trafficking Law*, *American Journal of International Law*, Vol. 108 No. 4.

Kurniawan, A. M. Y., Priadarsini, N. W. R., 2025, *Upaya Kantor Imigrasi sebagai Stakeholder dalam Pencegahan Penyelundupan dan Perdagangan Manusia Berdasarkan Protokol Palermo*, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, Vol. 8, No. 1.

Lukmanul Hakim, R., Darmadi, A. A. N. Y., 2025. *Implementasi HAM dalam TPPO*, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 10.

Luthvi Febryka Nola, 2023, *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2.

Mantouvalou, V., 2021, *The Positive Obligations of States in Combating Human Trafficking*, *International Journal of Human Rights*, Vol. 25, No. 5.

Menn, M., 2025, *Double-barrelled, double target: The Firearms Protocol between arms control and crime prevention*, *Transnational Criminal Law Review*, Vol. 4, No. 1.

- Neni Nuraeni & Dedi kania, 2017, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum Vol. 14, No. 1.
- Niken Yustirani, 2020, *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Jurnal Reschtsvinding, Vol. 9, No. 1.
- Nurmalia Ihsana, Dina Dwi Anggraini, 2025, *Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tanjungkarang, Lampung (Studi Kasus Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/ PN TJK)*, Iblam Law Review, Vol. 5, No. 2.
- Publishing, 2025, *Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Indonesia Journal of Law and Justice, Vol. 2, No. 3.
- Shavira Valeri Febriant, 2025, *Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja di Korea Pada Masa Pemerintahan Jokowi Dodo Tahun 2019-2024*, Jurnal Globals Insights, Vol. 2 No. 1.
- Zulfi Imran, 2019, *Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7, No. 7.

### C. Sumber Lain

Antara Indonesia News Agency, 2023, *Indonesia Expands Measures to Protect Migrant Workers Abroad*,

<https://en.antaranews.com/news/395710/indonesia-expands-measures-to-protect-migrant-workers-abroad>, Diakses Pada 30 Januari 2026, 00:55.

Ayu Sintia, 2022, *Bantuan IOM Kepada Pemerintahan Indonesia Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Melalui Pendekatan 3P (Pencegahan, Perlindungan, Penuntutan) Tahun 2018-2022*, Bandar Lampung, UNILA.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2022, *Kajian Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap PMI*, BP2MI, Jakarta.

Dandapala Contributor, 2023, *PK ditolak, pemilik perusahaan tetap dibuai 4 Tahun di kasus TPPO ke Jepang*,

<https://dandapala.com/article/detail/pk-ditolak-pemilik-perusahaan-tetap-dibui-4-tahun-di-kasus-tpo-ke-jepang>, Diakses Pada 29 Januari 2026, 23:22.

Detikedu, [Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia](#), Diakses Pada 13 September 2025, 16:45.

Douglas S. Massey et al, 2023, *Trafficking, Smuggling, and Human Rights*, *Migration Police Institute*,

<https://www.migrationpolicy.org/article/trafficking-smuggling-and-human-rights>, Diakses Pada 3 Februari 2026, 22:06.

Fakultas Hukum Universitas Nasional,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/94-persen-kasus-buruh-migran-indonesia-di-taiwan-bisa-selesai-lt5a9164b842037>, Diakses Pada 14 Juli 2025, 10:59.

IDN Times Bali, 2023, *Ratusan Warga Bali Menjadi Korban TPPO ke Jepang*, <https://bali.idntimes.com/news/bali/ratusan-warga-bali-menjadi-korban-tppo-ke-jepang-00-ttspd-c0k6wb>, Diakses Pada 30 Januari 2026, 00: 30.

ILO, 2021, *Fair Recruitment in Practice: Preventing Trafficking of Migrant Workers*, International Labour Organization, Geneva.

INP, 2023, *Indonesia Launches First Migrant Center to Prevent Human Trafficking*, <https://inp.polri.go.id/artikel/indonesia-launches-first-migrant-center-to-prevent-human-trafficking>, Diakses Pada 29 Januari 2026, 23:56.

IOM, 2022, *Access to Remedies for Victims of Trafficking in Persons in Southeast Asia*, International Organization for Migration, Geneva.

Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2022, *Evaluasi Pelaksanaan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Kemenaker RI, Jakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2021, *Pedoman Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, KPPPA, Jakarta.

Kementrian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, 2025, *Angka Kasus Terus Meningkat, Kemenko Polhukam Ajak Perangi TPPO*, [Angka Kasus Terus Meningkat, Kemenko Polhukam Ajak Perangi TPPO](#), Diakses Pada 30 Januari 2026, 01:25.

[Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2023 - Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia](#), Diakses pada 13 Desember 2025, 19:57.

Metro Tv, 2023, *3 Tersangka TPPO di Bali Ditangkap*, <https://www.metrotvnews.com/read/kM6C0xD1-3-tersangka-tpo-di-bali-ditangkap>, Diakses pada 30 Januari 2026, 00.15.

[Perdagangan Manusia dan Pekerja Migran dari Indonesia - MIGRANTCARE.NET](#), Diakses pada 13 Desember 2025, 19:39.

Tribun-Bali.com, 2023, *Lakukan TPPO Terhadap Ratusan Calon PMI ke Jepang, Akbar Divonis 4 Tahun dan Bayar Restitusi*, [Lakukan TPPO Terhadap Ratusan Calon PMI ke Jepang, Akbar Divonis 4 Tahun dan Bayar Restitusi - Tribun-bali.com](#), Diakses Pada 30 Januari 2026, 01:07.

U.S. Departemant of State, 2024, *Trafficking in Persons Report 2024: Indonesia*, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, Washington.

UNDOC, 2020, *Issue Paper on the Elements of Trafficking in Persons*, UNDOC, Wina.

UNDOC, 2020, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna.

UNDOC, 2021, *International Framework on Human Trafficking*, UNDOC, Wina.

UNDOC, 2021, *Legislative Guide for the Implementation of UNTOC*, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2004, *Firearms Protocol Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, United Nations, New York.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2004, *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, United Nations, New York.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2022, *Human Rights and Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons*, United Nations, Vienna.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2000, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations*

*Convention against Transnational Organized Crime*, United Nations, New York.

United Nations Office on Drugs and Crime, 2024, *Global Report on Trafficking in Persons 2024*, UNODC, Vienna.

UNODC, 2000, *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*, United Nations, New York.

UNODC, 2001, *Firearms Protocol Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, United Nations, New York.

UNODC, 2015, *Trafficking in Persons & Smuggling of Migrants Module 6: The Issue of Consent*, <https://www.unodc.org/cld/en/education/tertiary/tip-and-som/module-6/key-issues/the-issue-of-consent.html>. Diakses Pada 3 Februari 2026, 22:25.

UNODC, 2018, *Issue Paper: Smuggling of Migrants*, United Nations, Vienna.

UNODC, 2020, *Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, United Nations, New York.

UNODC, 2021, *Inter-Agency Cooperation in Trafficking in Persons Cases*, United Nations, Vienna.

UNODC, 2022, *Global Report on Trafficking in Persons 2022*, United Nations, Vienna.

UNODC, 2022, *Human Rights and Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons*, United Nations, Vienna.